

PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
EKA NOVIA HARDEANTI
NIM. E42010078

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
2014. E-mail : viiahardeant@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Judul ini diambil berdasarkan permasalahan Peranan Camat yang masih belum efektif dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan menggunakan pemikiran yang logis dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan secara sistematis tentang fenomena yang dihadapi dalam menggunakan kata-kata, kalimat untuk memperoleh kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan peranan camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masih belum efektif yang mana pada penelitian ini menggunakan faktor-faktor dalam koordinasi seperti kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin dengan dihubungkan teori dari Ketaren yang menyatakan bahwa pemberdayaan itu adalah sebuah proses. Yang artinya seorang camat dalam memberikan tahap kesadaran kepada masyarakat masih jauh dari harapan yang diinginkan. Selain itu dalam tahap pengkapasitasan yang diberikan camat seperti pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat belum berjalan maksimal. Serta pada tahap pemberian daya atau peluang, peranan camat masih kurang baik dan menganggap kualitas manajemen yang dimiliki masyarakat masih jauh dari apa yang diharapkan untuk dapat mewujudkan pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan mutu hidup masyarakat.

Kata-kata Kunci : Peranan, Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe and analyze the head of subdistrict in role to coordinate community empowerment activity at Sungai Kakap sub district Kubu Raya Regency. The title of this study taken because a problem that the head of subdistrict role still not effective in coordinate community empowerment activity at Sungai Kakap sub district Kubu Raya Regency. This study is using qualitative approach to describe every reality that use logical thinking by describe, explain, and analyze systematically about phenomenon in words, sentence to obtain conclusions and suggestions that need the head of subdistrict in role to coordinate community empowerment to increase people's lives are less able. The conclusions in this study shows that the head of subdistrict in role to community empowerment activity still not effective which this study using factors in coordination such as unity in action, communication, division of job, and disciplines connect to Ketaren theory stated that empowerment is a process. That mean the head of subdistrict provide awareness to the public stage is still far from the desired. The other than that in stage the head of subdistrict capacity given as guidance and training to people not running optimally. And the step of administering power or opportunity still not good role and assume management of the community's quality is still far from what is expected to be able to realize the national development aimed at the welfare of the community's quality of life.

Keywords : Role, Coordination, Community Empowerment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Di samping itu Indonesia juga di kenal sebagai negara majemuk yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama maupun sejarah. Pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah kecamatan, yang merupakan unit terdepan setelah desa dan kelurahan yang menjadi tonggak strategis dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu merupakan upaya untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat di tingkat kecamatan merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat yang terus berkembang, serta dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun lingkungan

internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di negara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan kecamatan yang tangguh dan di dukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Pemerintahan kecamatan harus benar-benar siap dan mampu untuk mengelola setiap potensi yang ada dalam lingkungan masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Banyak program-program pembangunan dan pemberdayaan dari pemerintah yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan dan lebih memberdayakan masyarakat.

Kecamatan Sungai Kakap merupakan salah satu yang mana melaksanakan program dari pemerintah seperti raskin, BLT, inpres desa tertinggal dan berbagai program lainnya. Agar program-program pemberdayaan masyarakat berjalan dengan lancar, maka diperlukannya peranan camat dalam mengkoordinasikan dan mengawasi

program tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal. Dengan adanya program seperti pemberdayaan masyarakat dari unit kerja pemerintah yang mana tidak dikoordinasikan dan diawasi secara efektif oleh Camat.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan undang-undang tersebut dalam substansinya juga mengalami suatu perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi sebagaimana mestinya dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran, serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada kebijakan otonomi daerah tersebut terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural terhadap keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut mengakibatkan kewenangan camat menjadi sangat bergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum terhadap optimalisasi peran dan kinerja camat dalam upaya memberdayakan masyarakat. Otonomi akan terlaksana apabila didalamnya terdapat partisipasi masyarakat atau dalam kata lain masyarakat dapat diperdayakan dengan baik. Pentingnya partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen dalam mendorong terciptanya *good governance*.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menjelaskan bagaimana camat

melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perijinan, pembina dan pengawas pemerintahan desa, pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit mensejahterakan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat pada posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah kabupaten/kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di lingkungan kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Untuk menyikapi hal tersebut diharapkan keterlibatan dari semua aspek yang bersifat positif untuk mendukung terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh. Setiap individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat

memiliki peran aktif yang sangat mempengaruhi dalam melakukan kontrol untuk menunjang kinerja pemerintahan. Yang mana di tingkat pemerintah kecamatan mempunyai peranan penting dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan banyaknya tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh camat baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas pembantuan lainnya, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

3. Rumusan Masalah Penelitian

Mengingat luasnya cakupan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka peneliti membatasi pembahasan pada Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Adapun rumusan permasalahan yang akan dipaparkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya ?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap ?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka penelitian yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya camat dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di

Kecamatan Sungai Kakap
Kabupaten Kubu raya.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemerintah dalam mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu raya.

5. Manfaat Penelitian

Ada beberapamanfaat yang dapatdiambil darihasil penelitian yang dilakukansecarateoritis dansecarapraktis yaitu:

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti, untukmeningkatkanpengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penelitian dan upaya mengungkapkan masalah yang dihadapi.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pemerintahan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang responsive, aspiratif, inovatif, dan kreatif.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara konseptual kepada pemerintah Kabupaten Kubu Raya, agar camat dapat menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan harapan dan keinginan.

2. Bagi Masyarakat, meningkatkan keterlibatan dan peran masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang dapat meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi, sebagai berikut : Kesatuan tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja, Disiplin. Berdasarkan faktor-faktor koordinasi

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka teori

Menurut Sedarmayanti (2004:33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Sedangkan Menurut Soekanto (2002:234) peranan yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

yang telah diungkapkan oleh Hasibuan, maka koordinasi yang ada di Kecamatan Sungai Kakap kurang efektif dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu diperlukannya beberapa tahapan-tahapan yang dapat membantu peranan camat dalam mencapai hasil yang efektif untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Menurut Ketaren (2008 : 178-183) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses instan”. Sebagai proses

pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: tahap penyadaran, tahap pengkapsitasan, dan tahap pemberian daya. Dari Beberapa proses pemberdayaan di atas hendaknya memberikan jawaban terhadap peneliti dalam menyelesaikan penulisan ini sesuai dengan harapan yang

diinginkan. Untuk itu peneliti memilih teori Ketaren yang dinilai cocok dalam melakukan penelitian pada saat dilapangan

2. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif yaitu dengan menggunakan data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa wawancara dan jawaban pertanyaan dari responden yang diberikan. Alasan mengapa peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dalam menganalisis peranan Camat dalam mengkoordinasikan

kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap.

Pada penelitian kualitatif yang digunakan sebagai instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sugiyono (2011:306) peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Adapun pengujian kredibilitas data penelitian yang akan digunakan peneliti dengan cara teknik triangulasi. Menurut Moleong (2012:321) Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan (reabilitas) menurut versi positivisme dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.

Teknik penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan menggunakan Triangulasi teknik yang mana menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data pada sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Selain itu peneliti juga menggunakan Triangulasi sumber sebagai salah satu dalam menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan menggunakan ketiga sumber data tersebut. Jadi triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.



Menurut Ketaren, proses dalam pemberdayaan melalui 3 tahapan yaitu: tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pemberian daya yang mana ketiga tahap tersebut membutuhkan koordinasi dalam melaksanakannya. Menurut Hasibuan ada 4 faktor yang mempengaruhi koordinasi, yakni sebagai berikut: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin.

Pertama kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan dalam pemberdayaan masyarakat belum cukup baik. Kedua komunikasi. Komunikasi yang terjalin antara camat dengan bawahan harus saling berhubungan satu sama lain. Ketiga pembagian kerja. Pembagian kerja baik camat, sekcam maupun kepala desa memiliki tugas masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dan keempat disiplin. Disiplin menjadi hal yang penting dalam menciptakan suatu koordinasi yang baik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari keempat faktor di atas bahwa peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Camat dalam Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

pemberdayaan masyarakat masih belum efektif dan dalam pelaksanaannya camat Pada tahap penyadaran peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi yang terjalin antara camat terhadap bawahan maupun masyarakat masih kurang dari apa yang diharapkan. Hal ini dilihat dari faktor-faktor berupa kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin yang tidak terlaksana dengan baik. Adapun program yang pemerintah luncurkan untuk masyarakat dalam pemberdayaan mempunyai tujuan mensejahterakan kehidupan

yang lebih baik untuk masyarakat yang kurang mampu dalam meningkatkan penghasilan dan pengetahuannya. Akan tetapi, peranan camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan dalam memberikan kesadaran terhadap masyarakat masih jauh dari harapan.

Selanjutnya pada tahap pengkapisitasan dimana masyarakat menerima pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh camat dengan

mengelola manajemen diri dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, dengan tujuan untuk mensukseskan program yang telah disusun oleh pemerintah agar masyarakat tersebut dapat diberdayakan semaksimal mungkin dalam pembangunan yang berguna mensejahterakan masyarakat. Pada tahap pengkapisitasan ini peranan camat dalam koodinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat, akan tetapi peran camat tersebut masih dianggap belum maksimal oleh masyarakat dalam pemberdayaan di kecamatan sungai kakap.

Dan Pada tahap pemberian daya, berdasarkan dari kedua tahap diatas dapat disimpulkan masih kurangnya peranan camat dalam memberikan peluang kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak diberdayakan dengan baik yang mana rata-rata kualitas manajemen yang dimiliki masih jauh dari apa yang diharapkan untuk dapat mewujudkan pembangunan nasioanal yang bertujuan untuk

mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.

Untuk itu hendaknya camat dalam hal ini mampu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat lebih mandiri dalam mensejahterakan kehidupan yang lebih baik lagi. Maka peneliti memberikan beberapa saran-saran sebagai masukan untuk dapat meningkatkan mutu dan manfaat penelitian ini di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Adapun saran tersebut sebagai berikut.

1. Camat hendaknya harus jelas dalam memberikan suatu arahan terhadap masyarakat mengenai penyadaran pada pola pikir masyarakat betapa pentingnya suatu pemberdayaan dilakukan dalam pembangunan, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri tanpa harus bergantung pada pemerintah kecamatan.
2. Camat hendaknya memberikan kapasitas kepada masyarakat

berupa pembinaan atau pelatihan dalam pengembangan pembangunan, yang mana masyarakat tersebut dapat menggali potensi yang dimiliki.

3. Camat harus memberikan peluang kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat paham akan pentingnya pemberdayaan yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik kedepannya.

2. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan yang peneliti temukan pada saat dilapangan yaitu : Kurangnya pengetahuan informan menjadi kendala peneliti dalam melakukan penelitian, maka dari itu peneliti harus pandai mengolah kata agar dapat dimengerti oleh informan tersebut dalam memperoleh data yang diinginkan. Keterbatasan waktu penelitian yang diberikan kepada peneliti kurang lebih 2 minggu membuat peneliti sulit untuk mendalami permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga informasi yang diperoleh peneliti

tidak maksimal. Terbatasnya judul yang diberikan untuk diteliti, membuat peneliti diharuskan mengambil judul yang berkaitan dengan pemerintahan. Selain itu peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan peneliti masih pemula dan masih terlalu kaku untuk merangkai kalimat dalam penulisan. Maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen. Edisi Kedua. Cetakan Kedelapan belas*. Yogyakarta. Lappera Pustaka Mandiri.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Kataren, Nurlela. 2008. *Buku Ajar Administrasi Pembangunan*. FISIP USU
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Aksara
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta. Grasindo.
- Raho, Bernerd. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prestasi Pustakaraya.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Dua*. Bandung. Mandar Maju.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, Sri. 1976. *Sistem Pemerintahan ASEAN*. Bandung. Transito.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung. Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada

Skripsi

- Edo, 2013. *Peran Camat Dalam Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Di Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Permendagri No 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat

Rujukan elektronik

Junaidipiscesguru.blogspot.com/2010/06/teori-peranan-pemerintah.html?m=1

Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24100/4/Chapter20%.pdf

Eprints.uny.ac.id/8736/3/BAB%20%20-%2005401244010.pdf

Eprints.uny.ac.id/8072/3/BAB%20%20-%2007102241007.pdf





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : EKA NOVIA HARDEANTI
NIM / Periode lulus : E42010078 / 2014
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : viiahardeant@gmail.com / 082149846046

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERANAN CAMAT DALAM MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN
PERBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN
SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Prodi IP



Dr. H. Wijaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 Januari 2015


(EKA NOVIA HARDEANTI)